



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BATAM

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JEFRIDIN**

2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

3. NHK : **69316**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.202.256.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 278.952.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/288 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 370.176.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 748 m2/520 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 719.744.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 186.086.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 768 m2/1017 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.888.124.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/438 m2 di KAB / KOTA KOTA
 BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.412.374.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 346.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

305.000.000

- MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
- 2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
- MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T (WARNA MERAH) Tahun
 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

226.377.541





D. SURAT BERHARGA	Rp.	OK OH
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.241.006.586
F. HARTA LAINNYA	Rp.	255.644.916
Sub Total	Rp.	10.230.285.043
III. HUTANG	Rp.	
IV. TOTAL H <mark>A</mark> RTA KEKA <mark>Y</mark> AAN (II-III)	Rp.	10.230.285.043

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.